Transparansi Desa Bukan Sekadar Kewajiban Administratif, tetapi Fondasi Kepercayaan Masyarakat

Oleh: Dr. Mohsi, M.H.I



Advokat dan Dosen Tetap Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan

Pasanggar, Pamekasan - Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu modal terpenting dalam membangun sebuah desa. Pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan anggaran, program kerja, dan kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan administrasi. Lebih dari itu, diperlukan hubungan yang sehat antara pemerintah desa dan masyarakat. Hubungan tersebut dibangun melalui komunikasi yang terbuka, pengelolaan pemerintahan yang bertanggung jawab, serta kesediaan untuk memberikan informasi kepada publik.

Dalam konteks tersebut, transparansi menjadi prinsip yang sangat penting. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana kebijakan dirumuskan, program pembangunan direncanakan, anggaran dikelola, dan hasil kegiatan dilaksanakan. Keterbukaan informasi memungkinkan warga memahami proses pemerintahan sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi.

Namun, transparansi sering kali masih dipahami sebatas kewajiban administratif. Informasi dianggap telah terbuka ketika dokumen tertentu tersedia atau papan pengumuman telah dipasang. Padahal, makna transparansi jauh lebih luas daripada sekadar memenuhi persyaratan administrasi.

Transparansi seharusnya menjadi budaya pemerintahan yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara mudah, memahami kebijakan yang dijalankan, dan ikut mengawasi pembangunan. Sebab, pemerintahan desa yang terbuka bukan hanya memperlihatkan apa yang telah dikerjakan, tetapi juga bersedia menjelaskan mengapa suatu keputusan diambil dan bagaimana keputusan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.

Transparansi Dimulai dari Hak Masyarakat untuk Tahu

Masyarakat bukan sekadar penerima program pembangunan. Mereka merupakan bagian penting dari kehidupan pemerintahan desa yang memiliki hak untuk mengetahui berbagai informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi mengenai perencanaan pembangunan, prioritas program, penggunaan anggaran, pelayanan publik, dan pelaksanaan kegiatan merupakan hal yang penting untuk diketahui

masyarakat. Dengan informasi yang memadai, warga dapat memahami arah pembangunan sekaligus menilai apakah program yang dijalankan telah sesuai dengan kebutuhan bersama.
Bayangkan ketika masyarakat mengetahui bahwa desa sedang merencanakan pembangunan infrastruktur, tetapi tidak memperoleh informasi mengenai alasan pemilihan lokasi, prioritas kegiatan, atau tahapan pelaksanaannya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan pertanyaan dan kesalahpahaman.
Sebaliknya, ketika informasi disampaikan secara terbuka dan mudah dipahami, masyarakat memiliki dasar yang lebih baik untuk memberikan masukan. Mereka tidak hanya mendengar kabar dari percakapan sehari-hari, tetapi memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, keterbukaan informasi bukanlah bentuk kemurahan hati pemerintah desa. Ia merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus penghormatan terhadap hak masyarakat.

Akuntabilitas: Bukan Hanya Menghabiskan Anggaran, tetapi Mempertanggungjawabkan Manfaatnya

Transparansi memiliki hubungan erat dengan akuntabilitas. Jika transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban mempertanggungjawabkan keputusan, penggunaan sumber daya, dan hasil pelaksanaan program.
Dalam pengelolaan pemerintahan desa, anggaran bukan sekadar angka dalam dokumen keuangan. Di balik setiap alokasi anggaran terdapat kepentingan masyarakat yang harus diperhatikan.
Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak seharusnya hanya diukur dari kemampuan menyerap atau merealisasikan anggaran. Hal yang lebih penting adalah apakah anggaran tersebut digunakan sesuai perencanaan, dilaksanakan secara bertanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Sebagai contoh, pembangunan jalan desa tidak cukup dinilai dari terselesaikannya pekerjaan fisik. Perlu diperhatikan pula kualitas pekerjaan, kesesuaian dengan kebutuhan warga, manfaat bagi aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, serta keberlanjutan pemeliharaannya.
Demikian pula program pemberdayaan ekonomi. Keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan yang diselenggarakan, tetapi juga dari sejauh mana kegiatan tersebut membantu meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat.
Dengan demikian, akuntabilitas tidak berhenti pada laporan administratif. Ia harus mencerminkan tanggung jawab terhadap hasil dan manfaat pembangunan.

Website Desa sebagai Jendela Informasi Publik

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar bagi pemerintah desa untuk memperkuat transparansi. Salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan adalah website desa.
Website desa seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat mempublikasikan berita kegiatan, dokumentasi acara, atau informasi seremonial pemerintahan. Lebih dari itu, website dapat dikembangkan menjadi pusat informasi publik yang memudahkan masyarakat mengetahui perkembangan desa.
Informasi mengenai profil desa, program pembangunan, hasil musyawarah, pelayanan administrasi, potensi ekonomi, kegiatan sosial, dan perkembangan pembangunan dapat disampaikan melalui media tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Website juga dapat menjadi sarana komunikasi dua arah. Masyarakat tidak hanya membaca informasi, tetapi juga dapat menyampaikan pertanyaan, saran, dan aspirasi melalui saluran komunikasi yang disediakan.
Namun, digitalisasi informasi tidak cukup hanya dengan membuat website. Informasi harus diperbarui secara berkala, disajikan dengan bahasa yang sederhana, dan mudah diakses oleh

masyarakat. Website yang jarang diperbarui atau hanya berisi dokumentasi kegiatan belum sepenuhnya menjalankan fungsi sebagai sarana keterbukaan informasi.
Di sisi lain, pemerintah desa juga perlu memperhatikan keamanan data dan perlindungan informasi pribadi. Tidak semua dokumen dapat dipublikasikan secara terbuka. Keterbukaan harus tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan dan perlindungan data masyarakat.
Dengan pengelolaan yang baik, website desa dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun komunikasi yang lebih terbuka.

Partisipasi Warga: Dari Mengetahui Menjadi Ikut Mengawasi
Transparansi akan lebih bermakna apabila diikuti oleh partisipasi masyarakat. Informasi yang terbuka memberikan kesempatan bagi warga untuk memahami kebijakan, menyampaikan aspirasi, dan ikut mengawal pelaksanaan pembangunan.
Partisipasi tersebut dapat dimulai dari hal sederhana, seperti menghadiri musyawarah desa, memberikan masukan terhadap program pembangunan, mengikuti perkembangan kegiatan, serta menyampaikan pertanyaan ketika terdapat informasi yang belum jelas.
Masyarakat juga perlu membangun budaya partisipasi yang sehat. Kritik sebaiknya disampaikan dengan cara yang santun, berdasarkan informasi yang dapat dipercaya, dan disertai gagasan perbaikan. Mengawasi bukan berarti mencari kesalahan, melainkan memastikan bahwa kepentingan bersama tetap menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan.
Sebaliknya, pemerintah desa perlu memandang masukan masyarakat sebagai bagian dari proses perbaikan. Kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman, tetapi sebagai kesempatan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan pembangunan.
Hubungan semacam ini akan menciptakan ruang komunikasi yang lebih sehat. Pemerintah tidak bekerja dalam ruang tertutup, sementara masyarakat tidak hanya menjadi penonton dari kebijakan yang dijalankan.

Membangun Kepercayaan, Bukan Sekadar Menghindari Kecurigaan
Salah satu manfaat utama transparansi adalah tumbuhnya kepercayaan masyarakat. Ketika pemerintah desa terbuka dalam menyampaikan informasi, menjelaskan keputusan, dan mempertanggungjawabkan program, masyarakat memiliki dasar yang lebih kuat untuk memahami proses pemerintahan.
Kepercayaan tidak dibangun melalui slogan atau pernyataan bahwa pemerintah telah bekerja dengan baik. Kepercayaan tumbuh melalui konsistensi antara apa yang direncanakan, apa yang disampaikan, dan apa yang benar-benar dilaksanakan.
Sebaliknya, keterbatasan informasi dapat membuka ruang bagi kesalahpahaman, prasangka, dan berkembangnya kabar yang belum tentu benar. Dalam situasi seperti itu, persoalan kecil sekalipun dapat berkembang menjadi ketidakpercayaan apabila tidak dijelaskan secara terbuka.
Karena itu, transparansi perlu dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang. Pemerintah desa yang membangun budaya keterbukaan sedang memperkuat hubungan dengan masyarakat. Sementara masyarakat yang aktif mencari informasi dan berpartisipasi sedang ikut menjaga kualitas pemerintahan.

Desa Terbuka Membutuhkan Komitmen Bersama
Mewujudkan pemerintahan desa yang transparan tentu tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pihak. Pemerintah desa perlu menyediakan informasi yang benar, mudah diakses, dan dapat dipahami. Masyarakat perlu membangun kebiasaan untuk mencari informasi, mengikuti proses pembangunan, dan menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab.

Tokoh masyarakat, pemuda, lembaga kemasyarakatan, serta berbagai komunitas juga dapat mengambil peran dalam menyebarluaskan informasi dan memperkuat literasi publik.
Langkah sederhana dapat dimulai dengan memperbarui informasi melalui website desa, mempublikasikan ringkasan hasil musyawarah, menyediakan saluran pengaduan, menyampaikan perkembangan program pembangunan, serta memberikan penjelasan terhadap aspirasi masyarakat.
Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa informasi yang disampaikan bukan hanya lengkap secara administratif, tetapi juga mudah dipahami oleh warga dari berbagai latar belakang pendidikan dan sosial.
Transparansi harus menjadi kebiasaan, bukan hanya dilakukan ketika ada pemeriksaan, kegiatan tertentu, atau permintaan informasi dari masyarakat.

Penutup: Desa yang Terbuka, Masyarakat yang Percaya
Pada akhirnya, desa yang maju bukan hanya desa yang mampu membangun infrastruktur dan melaksanakan berbagai program pembangunan. Desa yang maju juga merupakan desa yang memiliki pemerintahan terbuka, masyarakat yang aktif, serta hubungan sosial yang dibangun atas dasar kepercayaan.
Transparansi bukan berarti pemerintah harus selalu dianggap benar atau masyarakat harus selalu menyetujui setiap keputusan. Justru, keterbukaan memberikan ruang bagi perbedaan pandangan untuk dibicarakan secara sehat dan bertanggung jawab.
Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menjalankan pemerintahan secara terbuka dan akuntabel. Masyarakat memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk terlibat dalam mengawal pembangunan. Keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan desa yang lebih baik.
Sudah saatnya transparansi tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif yang diselesaikan melalui dokumen dan laporan. Transparansi harus menjadi fondasi dalam membangun pemerintahan yang dipercaya dan masyarakat yang berdaya.

Sebab, desa yang kuat bukan hanya desa yang memiliki anggaran dan program pembangunan, tetapi desa yang mampu membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakatnya. Dan kepercayaan itu tumbuh ketika keterbukaan menjadi budaya bersama.